

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 10, No. 1, Maret 2019

ISSN: 2087-2054

Sinkronisasi Harga Saham Melalui Kualitas AkruaL Dan Risiko Pasar di Bursa Efek Indonesia Studi Khusus Perusahaan Perbankan.

Dedi Putra & Putri Azhura

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

Aminah, Khairudin & Indrayenti

Analisis Perbedaan *Abnormal Return*, Volume Dan Harga Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA).

Pebrina Swissia & Feby Eka Putri Darmawan

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja.

Anik Irawati & Caesar Agesta

Penerapan *Activity Based Costing System* Dalam Evaluasi Penentuan Tarif Rawat Inap Pada Rumah Sakit GMC Taman Sari.

Herry Goenawan Soedarsa & Rosmiati

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Baturaja Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.

Mardiah Kenamon & Putra Deba Devara

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 10, No. 1, Maret 2019

ISSN: 2087-2054

Dewan Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A
Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A.Ec.

Penanggung Jawab

Dra. Rosmiaty Tarmizi, M.M.Akt. C.A

Pimpinan Redaksi

Dr. Angrita Denziana, S.E., M.M, Ak. C.A

Sekretaris Redaksi

Riswan, S.E., M.S.Ak
Haninun, S.E., M.S.Ak

Penyuting Ahli (Mitra Bestari)

Tina Miniawati, S.E., M.B.A. (Universitas Trisakti)
Dr. Khomsiyah, S.E., M.M. (Universitas Trisakti)
Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.Akt., C.A. (Universitas Lampung) Sujoko
Efferin, Mcom (Hons), MA(Econ), Ph.D. (Universitas Surabaya)

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
SENARAI-Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret &
September

Artikel yang dimuat berupa hasil riset Empiris dan telaah teoritis konseptual yang kritis
dalam kajian bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan keuangan.

Alamat Redaksi

Gedung G- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
Kampus A Jalan Z.A Pagar Alam No. 26 Labuan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp: (0721) 701979, Fax: (0721) 701467, Email: *Prodi.akuntansi@ubl.ac.id*

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 10, No. 1, Maret 2019

ISSN: 2087-2054

Sinkronisasi Harga Saham Melalui Kualitas AkruaL Dan Risiko Pasar di Bursa Efek Indonesia Studi Khusus Perusahaan Perbankan.

Dedi Putra & Putri Azhura

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

Aminah, Khairudin & Indrayenti

Analisis Perbedaan *Abnormal Return*, Volume Dan Harga Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA).

Pebrina Swissia & Feby Eka Putri Darmawan

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja.

Anik Irawati & Caesar Agesta

Penerapan *Activity Based Costing System* Dalam Evaluasi Penentuan Tarif Rawat Inap Pada Rumah Sakit GMC Taman Sari.

Herry Goenawan Soedarsa & Rosmiati

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Baturaja Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.

Mardiah Kenamon & Putra Deba Devara

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 10, No. 1, Maret 2019

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Sinkronisasi Harga Saham Melalui Kualitas AkruaL Dan Risiko Pasar Bursa Efek Indonesia Studi Khusus Perusahaan Perbankan. Dedi Putra & Putri Azhura	1-21
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Aminah, Khairudin & Indrayenti	22-33
Analisis Perbedaan <i>Abnormal Return</i> , Volume Dan Harga Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA). Pebrina Swissia & Feby Eka Putri Darmawan	34-55
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. Anik Irawati & Caesar Agesta	56-70
Penerapan <i>Activity Based Costing System</i> Dalam Evaluasi Penentuan Tarif Rawat Inap Pada Rumah Sakit GMC Taman Sari. Herry Goenawan Soedarsa & Rosmiati	71-78
Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Baturaja Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. Mardiah Kenamon & Putra Deba Devara	79-98

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 10, No. 1, Maret 2019

ISSN: 2087-2054

Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala

I. Kebijakan editorial

JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, Akuntansi Internasional, Akuntansi Managemen, Akuntansi Keperilakuan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

Sekretariat Editor Berkala

Gedung F - Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142

Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

II. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat **JURNAL** Akuntansi & Keuangan rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.
2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik.
3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbitkan.
4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta hasil dan simpulan (jika memungkinkan).

5. Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
6. Untuk penelitian kuantitatif,
 - a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur maksimum 40 % total halaman.
 - b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda maksimum 20 % total halaman.
7. Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.
8. Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan pembahasan minimum 25 % total halaman.
9. Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari keseluruhan lembar artikel.
10. Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan oleh organisasi.
 - a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), nama penerbit, dan kota penerbitan.
 - b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
 - c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan (bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, dan halaman.
 - d. Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya.
 - e. Tabel diberi nomor dan judul dilengkapi dengan sumber data yang ditulis dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data.
 - f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan judul.
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah artikel menggunakan petunjuk yang dirujuk pada The Indonesian Journal of Accounting Research, sebagai berikut:
 - A. Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut:
 - I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981).
 - II. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991).
 - III. Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede et al., 1990).
 - IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988).
 - V. Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983).
 - VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
 - VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan akronim institusi (FASB, 1994)
 - B. Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut:
 - I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis atau nama lembaga.

- II. Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan nomor halaman. Contoh:
- a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan Keuangan Eksternal. 1977. Pernyataan tentang Teori Akuntansi dan Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA.
 - b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan akuntansi pertanggungjawaban, *Jurnal Akuntansi Penelitian* 27 (Spring): 40-58.
 - c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evanston, IL.
 - d) Indriantoro, N. 1993. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Locus of Control dan Dimensi Budaya sebagai Moderating Variabel. Ph.D. Disertasi. University of Kentucky, Lexington.
 - e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam Keputusan Harga oligopolistik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12 (3): 43-50.
 - f) Porcano, T. M. 1984a. Keadilan distributif dan Kebijakan Pajak. *Akuntansi Ulasan* 59 (4): 619-636.
 - g) ----- . 1984b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Pajak Niat Investasi Perusahaan. *The Journal of American Association Perpajakan* 6 (Fall): 7-19.
 - h) Pyndyk, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1987. Model ekonometrik & Forecasts Ekonomi, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.
12. Author(s) harus melampirkan CV, alamat email, alamat korespondensi dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan /atau pos.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS
KINERJA**

Anik Irawati

Caesar Agesta

(Fakultas Ekonomi IIB Darmajaya, Lampung)

(Fakultas Ekonomi IIB Darmajaya, Lampung)

Email: anikirawati@darmajaya.ac.id

Email: ervanercacaesar@gmail.com

ABSTRACT

This research was aimed to prove empirically the effect of the budget target clarity, the accounting control, the public accounting implementation, the laws and regulations obedience, and the reporting system on the performance accountability of OPD in Bandar Lampung. The sampling technique used in this research was the purposive sampling. A number of samples used in this research were 93 respondents (employees who handled finances at OPD). The data analysis technique used in this research was the structural equal model analysis. The data analysis technique used in this research was the PLS program. The result of this research showed that the budget target clarity, the public accounting implementation, the laws and regulation obedience, and reporting systems had a significant and positive effect on the performance accountability of government agencies; moreover, the accounting control did not have a significant and positive effect on the performance accountability.

Key word: *Budget Target Clarity, Accounting Control, Public Accounting Implementation, Laws Regulations Obedience, Reporting System, Performance Accountability.*

1. Latar Belakang

Hasil kerja organisasi perangkat daerah yang telah dicapai, dapat diketahui melalui informasi akuntabilitas kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut. Informasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi yang ada, pemerintah akan mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi menurut Santoso (2008) dalam Cefrida dkk (2014).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan pengawasan terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah penerapan akuntansi publik, kualitas peraturan perundangan serta ketaatan pada peraturan perundangan itu sendiri, kualitas laporan keuangan (Pamungkas, 2012), standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan (Jannaini, 2013), kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan (Herawaty, 2011), kompetensi aparatur pemerintah daerah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan. (Zirman dkk, 2010), dan banyak hal lainnya.

Penelitian ini merupakan replikasi sekaligus pengembangan dari penelitian Cefrida, dkk (2014) tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. Cefrida, dkk (2014) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang diterapkan pada instansi pemerintah kota Pekanbaru memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan Pengujian pengaruh variabel pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi sektor publik, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap variabel akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menambahkan variabel sistem pelaporan yang terdapat pada penelitian Herawaty (2011) yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Selain itu penelitian ini juga menambahkan variabel ketaatan pada peraturan perundangan yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Zirman, dkk (2010)

2. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan. LAN RI dan BPKP (2003).

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi perusahaan, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan rencana. Variabel ini dinyatakan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam penelitian Abdullah (2004) dan Herawaty (2011), akan tetapi tidak berpengaruh dalam Anjarwati (2012). Hasil penelitian Cefrida, dkk (2014) memperlihatkan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap variabel akuntabilitas kinerja menunjukkan memiliki pengaruh Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh negatif.

2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran yang biasa disebut *Business Budget* (anggaran perusahaan) atau *budget* (anggaran) yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Munandar (2007). Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Suharono dan Solichin (2006). Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat

dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Suharono dan Solichin (2006).

Variabel ini berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah (2004) dan Herawaty (2011) akan tetapi tidak berpengaruh dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haspiarti (2012). Hasil penelitian Cefrida, dkk (2014) memperlihatkan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif.

2.3 Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan. Mulyadi (2008). Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi perusahaan, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan rencana. Dalam perusahaan atau organisasi kecil, manajer atau pemilik dapat mengamati dan mengendalikan sendiri semua operasinya. Baginya adalah mudah untuk mengamati usaha produksi dari setiap pegawai dan juga tingkat persediaan bahan baku dan barang dalam proses. Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan. Penggunaan struktur akuntansi memungkinkan diadakannya pengendalian biaya dan perbandingan biaya-biaya tersebut dengan rencana tindakan yang ditetapkan sebelumnya. Melalui pengukuran prestasi kerja (*performance*) dengan penggunaan catatan dan laporan-laporan akuntansi dan statistik, manajemen dapat memberikan petunjuk yang sesuai dan mengarahkan kegiatan perusahaan.

2.4 Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Bastian (2006). Adapun tujuan Akuntansi Sektor Publik yaitu:

1. *Management Control*, tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan/ dianggarkan untuk sebuah organisasi.

2. *Accountability*, tujuan ini hampir sama dengan *management control* yaitu memberikan informasi yang berguna untuk manager sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab sumber daya/ bidang/ divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana/ anggaran publik.

Kehadiran akuntansi sektor publik memang sangat penting dalam pembuatan laporan yang terkait dengan transaksi dan kegiatan keuangan pada lingkup pemerintahan. Peranannya yang penting ini juga tercantum dan didukung dasar hukum yang jelas seperti UUD 1945 amandemen IV yang menjelaskan keuangan negara, UU nomor 5 tahun 1974 pasal 64 (Fungsi APBD), dan lainnya.

Variabel ini terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pamungkas (2012), dan Santoso (2008) namun tidak berpengaruh dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riantriano (2011). Hasil penelitian Cefrida, dkk (2014) yang memperlihatkan variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh negatif.

2.5 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Sistem hukum yang berlaku disuatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut *Civil Law* atau *Common Law*. Dengan *civil law* maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, *common law* segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum. Dalam hal pembentukan akuntansi pemerintah sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai, maka PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintah (*a manual for government accounting*) yaitu dapat memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan perundangan.

Ketaatan pada peraturan perundangan itu sangat penting dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar lebih teratur, tertata, dan efisien dalam keuangan daerah. Variabel ini telah terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam penelitian Riantiaro (2011) dan Zirman (2010) akan tetapi tidak berpengaruh dalam Haspiarti (2012). Hasil penelitian

Cefrida, dkk (2014) memperlihatkan variabel Ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh negatif.

2.6 Sistem Pelaporan

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Lembaga pemerintah di tuntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial. Mardiasmo (2009). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Abdulah (2005). Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam penelitian Herawaty (2011) Abdullah (2004) dan Anjarwati (2012).

Bangunan Hipotesis

- H1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- H2: Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- H3: Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- H4: Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- H5: Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

3. METODE PENELITIAN

Populasi

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Bandar Lampung.

Sampel

Sasaran dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan dan

laporan akuntabilitas di organisasi perangkat daerah (OPD) kota bandar lampung. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas /Instansi terkait dan Sekretaris Dinas/Instansi pada OPD Kota Bandar Lampung.
2. Perwakilan dari dinas tersebut dengan pertimbangan bahwa mereka adalah pihak yang menangani bagian keuangan untuk memberikan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pada masing-masing dinas yang menjadi objek penelitian akan dikirimkan 5 buah kuisisioner.

Definisi Variabel

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Suharono dan Solichin (2006). Indikator kejelasan sasaran anggaran tercermin dalam 6 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert.

Pengendalian Akuntansi

Definisi Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan. Mulyadi (2008). Indikator pengendalian akuntansi tercermin dalam 4 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert.

Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Penerapan Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2006). Indikator penerapan akuntansi sektor publik tercermin dalam 4 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert.

Ketaatan Pada Peraturan.

Dalam hal pembentukan akuntansi pemerintah sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai, maka PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintah (*a manual for government accounting*) yaitu dapat memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan perundangan. Indikator penerapan akuntansi sektor publik tercermin dalam 3 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert.

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdulah, 2005).

Indikator sistem pelaporan tercermin dalam 5 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert.

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Indikator sistem pelaporan tercermin dalam 4 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Software SmartPLS*.

4. Hasil dan Pembahasan

Data dan Sampel

Berikut data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1 : Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner didistribusikan	100
2	Kuesioner tidak diisi	7
3	Kuesioner diolah	93
Respon Rate 93%		

Sumber : Data diolah

Uji Validitas

Hasil pengujian validitas terhadap item-item pertanyaan pada variabel akuntabilitas kinerja, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi publik, ketaatan pada peraturan dan sistem pelaporan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 : Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Akuntabilitas Kinerja	Item 1	0,642	0,204	Valid
	Item 2	0,886	0,204	Valid
	Item 3	0,857	0,204	Valid
	Item 4	0,710	0,204	Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran	Item 1	0,773	0,204	Valid
	Item 2	0,826	0,204	Valid
	Item 3	0,785	0,204	Valid
	Item 4	0,751	0,204	Valid
	Item 5	0,731	0,204	Valid
	Item 6	0,666	0,204	Valid
Pengendalian Akuntansi	Item 1	0,749	0,204	Valid
	Item 2	0,776	0,204	Valid
	Item 3	0,819	0,204	Valid
	Item 4	0,772	0,204	Valid
Penerapan Akuntansi Publik	Item 1	0,793	0,204	Valid
	Item 2	0,890	0,204	Valid
	Item 3	0,680	0,204	Valid
	Item 4	0,682	0,204	Valid
Ketaatan Pada Peraturan	Item 1	0,900	0,204	Valid
	Item 2	0,896	0,204	Valid
	Item 3	0,878	0,204	Valid
Sistem Pelaporan	Item 1	0,839	0,204	Valid
	Item 2	0,726	0,204	Valid
	Item 3	0,953	0,204	Valid
	Item 4	0,928	0,204	Valid
	Item 5	0,943	0,204	Valid

Sumber : Data diolah

Dari output yang diperoleh, seluruh item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang sistem pelaporan adalah valid.

Uji Realibilitas

Hasil pengujian reliabilitas terhadap item-item pertanyaan pada variabel akuntabilitas kinerja, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi publik, ketaatan pada peraturan dan sistem pelaporan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 : Hasil Uji Realibilitas

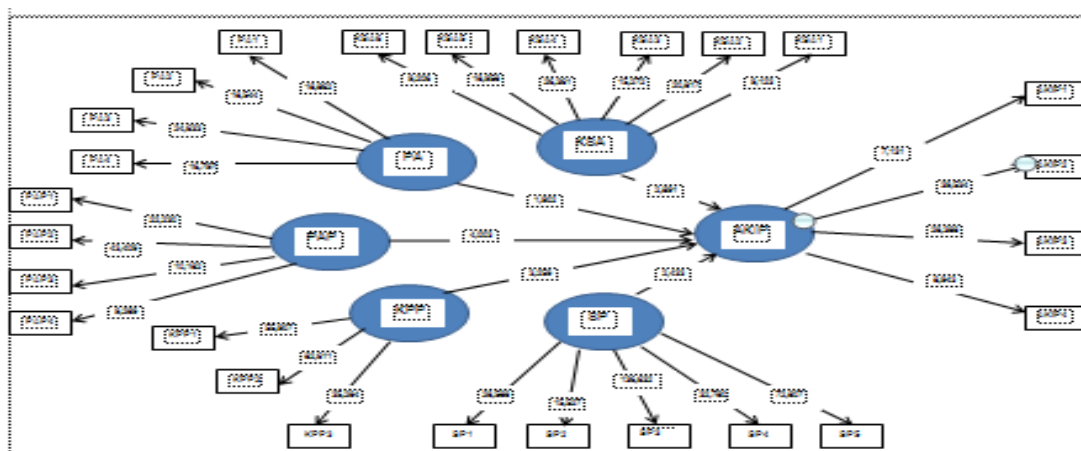
No	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Realibilitas	Keterangan
1	Akuntabilitas Kinerja	0,781	0,60	Realibel
2	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,849	0,60	Realibel
3	Pengendalian Akuntansi	0,784	0,60	Realibel
4	Penerapan Akuntansi Publik	0,764	0,60	Realibel
5	Ketaatan Pada Peraturan	0,867	0,60	Realibel
6	Sistem Pelaporan	0,928	0,60	Realibel

Sumber ; Data diolah

Berdasarkan data hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas diketahui nilai Cronbach's Alpha rata-rata diatas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Analisis SEM

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis *Partial Least Square* (PLS) adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Nilai Outer Model Orginal Sampel

Hasil pengolahan data dengan menggunakan *SmartPLS* dapat dilihat pada gambar 1. Nilai *Outer Model Original Sampel* atau korelasi antara konstruk dengan variabel secara umum sudah memenuhi *Convergent Validity* (≥ 0.5), *Discriminant Validity* (*Cross Loading* \geq *Correlations*), *Cronbachs Alpha* (≥ 0.6) dan *Composite Reliability* (≥ 0.7). Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh t tabel sebesar = 1,98761 sedangkan t hitung hasil olah data dapat dilihat pada model diatas adalah 2,891 untuk pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 1,902 untuk pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan 4,003 untuk penerapan akuntansi publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian 3,259 untuk ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya 2,433 untuk sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variable selain pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun hasil uji t ini dapat juga dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4 : Hasil Uji T Statistik

Variabel	Original Sample	Mean	Standard Error	T Statistics	P Values
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,135	0,132	0,047	2,891	0,004
Pengendalian Akuntansi	0,110	0,098	0,058	1,902	0,058
Penerapan Akuntansi Publik	0,244	0,232	0,061	4,003	0,000
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	0,300	0,289	0,092	3,259	0,001
Sistem Pelaporan	0,296	0,327	0,122	2,433	0,015

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai t statistik masing – masing variabel lebih besar dari dari 1,98761 untuk variabel kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi publik, ketaatan pada peraturan perundangan, dan system pelaporan. Dilihat dari nilai *p value* yang semuanya dibawah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan.

Pembahasan

Pengujian hipotesis pertama

Hasil perhitungan software *SmartPls* menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Abdullah (2004), Herawaty (2011), Anjarwati (2012), Cefrida, dkk yang

menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Suharono dan Solichin (2006). Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Dengan demikian aparatur yang terlibat dalam penyusunan anggaran di pemerintahan daerah harus lebih cermat agar kejelasan sasaran anggaran lebih optimal.

Pengujian hipotesis kedua

Hasil perhitungan software *SmartPls* menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Anjarwati (2012), Cefrida, dkk (2014) yang menyatakan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja. Menurut definisi Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan. Mulyadi (2008). Meskipun pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah kota Bandar Lampung, namun pengendalian akuntansi mesti tetap dikendalikan karena pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dana dari penggunaan yang tidak sah.

Pengujian hipotesis ketiga

Hasil perhitungan software *SmartPls* menunjukkan bahwa penerapan akuntansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Pamungkas (2012) dan Jannaini (2013) yang menyatakan penerapan akuntansi publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Kehadiran akuntansi sektor publik memang sangat penting dalam pembuatan laporan yang terkait dengan transaksi dan kegiatan keuangan pada lingkup pemerintahan. Perannya yang penting ini juga tercantum dan didukung dasar hukum yang jelas seperti UUD 1945 amandemen IV yang menjelaskan keuangan negara, UU nomor 5 tahun 1974 pasal 64 (Fungsi APBD), dan lainnya. Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Sehingga perlu dilakukan pengawasan yang baik dalam penerapan akuntansi publik agar berjalan sesuai dengan rencana.

Pengujian hipotesis keempat

Hasil perhitungan software *SmartPls* menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Zirman,dkk (2010), Riantiarno dan Azlina (2011), Pamungkas (2012) yang menyatakan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Peraturan perundangan diciptakan untuk menjaga agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, karena itu perlu dilakukan pengawasan guna memastikan ketaatan terhadap peraturan yang telah dibuat betul-betul dilaksanakan, dan dilakukan tindakan tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Pengujian hipotesis kelima

Hasil perhitungan software *SmartPls* menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Abdullah (2004), Herawaty (2011), dan Anjarwati (2012) yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Mardiasmo (2009), “Lembaga pemerintah diuntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial”. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Abdulah (2005). Melalui penerapan sistem pelaporan yang baik tentu semakin dapat meminimalisir peluang-peluang terjadinya kecurangan, sehingga semakin mendukung dalam mewujudkan akuntabilitas yang diharapkan.

5. Kesimpulan dan Saran**Kesimpulan**

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut : kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi publik, ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) kota Bandar Lampung. Sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah kota Bandar Lampung.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas maka saran-saran yang semoga dapat menjadi masukan sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan 5 variabel independen yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu

penulis mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan sampel organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah Bandar Lampung sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah cakupan. Sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasi lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Hilmi. 2004. Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.

Anjarwati, Mei. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD se-Kabupaten, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang)*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.

Cefrida S, Mentari; Nur DP, Emrinaldi; Hasan, H. Mudrika Alamsyah. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru*

Herawaty, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. Volume 13, Nomor 2, Hal. 31-36. ISSN 0852-8349*. Jambi. Universitas Jambi.

Jannaini, Yuli. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*. Bandung.

Lembaga Adminstrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Munandar, M. 2007. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja (Edisi 2)*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Pamungkas, Bambang. 2012. Pengaruh penerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading, Volume 12 No.1*, April 2012 : 1- 10.

Riantiarno, Reynaldi dan Azlina Nur. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah (Studi pada Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Pekbis, Jurnal, Vol.3, No3*

Suhartono, E. dan Solichin, M. (2006). *“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi”*. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang, 23-26 Agustus 2006.

Zirman, Edfan Darlis, dan R. Muhammad Rozi. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi, Volume 18 Nomor 1, maret 2010*.